

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENERAPAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN, SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh:

Isty Riani

Pembimbing: Restu Agusti dan Al Azhar A

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : riani_isty@yahoo.co.id

*Effect of Application of Financial Accounting, The Implementation of Financial
Accountability, Reporting System of Government Accountability Performance
(AKIP) West Sumatra Province District Agam*

ABSTRACT

The purpose of this study is to demonstrate empirically the area of financial accounting application, implementation and application of the system of financial accountability reporting against performance accountability of government agencies. The sample was head of the planning section, sub-section chief financial, chief of personnel (with the categorization rank / class of echelon echelon III and IV) who served in Local Government Agencies located in Agam District Government, amounting to 54 people. Data collection techniques using a questionnaire filled out by each sample. To test the hypothesis of the study used multiple regression analysis with SPSS. Results of the study explained that the application of financial accounting area affect the accountability of agency performance in Agam District. This means that at SKPD Agam, performance accountability of each SKPD affected by the application of financial accounting area. application of financial accountability have a significant impact on performance accountability institutions in Agam District. That is the better application of financial accountability, the better accountability of agency performance in Agam District. accountability information system affect the agency's performance in Agam District. This means that at SKPD Agam, performance accountability of each SKPD influenced by the information system.

Keywords: Accountability, Finance, Reporting and Performance.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah daerah, menyatakan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.. Kedua Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan akuntabilitas adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Rencana Strategis dari Inpres No. 7/99 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Inpres No. 7/99 memiliki tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun. Menurut Pamungkas (2012) pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Ketiga pilar dimaksud adalah (1) Transparansi; (2) Partisipasi; dan (3) Akuntabilitas.

Sejalan dengan semangat akuntabilitas dan transparansi dalam rangka reformasi pengelolaan keuangan pemerintah, dorongan terhadap kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintah juga meningkat. Pengukuran kinerja diperlukan sebagai informasi mengenai manfaat yang diberikan dari jasa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Kinerja secara umum dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program untuk mencapai suatu sasaran, tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Menurut Halim dalam Herawaty (2012), akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan

pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Proses kinerja pemerintah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun penanggungjawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi dan instansi masing-masing.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto dalam Santoso, 2008). Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dalam Inpres No. 58 Tahun 2005 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dinyatakan bahwa AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Hasil evaluasi LAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Aparatan

Negara dan Reformasi setiap tahunnya diketahui LAKIP Kabupaten Agam

Tabel 1.1
Skor Nilai LAKIP Kabupaten Agam 2009-2013

Tahun	Nilai	Skor	Keterangan
2009	C	30 – 50	Cukup
2010	C	30 – 50	Cukup
2011	Cc	30 - 50	Cukup
2012	C	50 – 65	Cukup baik
2013	C	30 – 50	Cukup

Sumber: LAKIP Kabupaten Agam, 2015

Hasil penilaian menunjukkan bahwa LAKIP Kabupaten Agam termasuk pada kategori Cukup. Hanya pada tahun 2012 penilaian LAKIP Kabupaten Agam mendapat nilai Cc yang termasuk kategori cukup baik (memadai). Untuk tahun selanjutnya hingga tahun 2013 penilaian LAKIP Kabupaten Agam memperoleh nilai C atau kategori cukup. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja belum terlaksana sesuai yang diharapkan publik atau masyarakat sehingga memberikan dampak dan nilai positif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan perhitungan dan Analisis Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Agam yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan tingkat realisasi, ternyata dari 97 sasaran yang ditetapkan dengan 309 indikator sebanyak 209 indikator capaiannya diatas 100%, hal ini disebabkan antara lain kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh penganggaran dan sumber daya manusia yang menguasai bidang pekerjaannya, sedangkan 100 indikator masih dibawah 100% dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah keterbatasan dana yang tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2013

masih terdapat beberapa performance gap (celah kinerja perbedaan antara target kinerja dengan realisasinya dimana realisasi lebih rendah daripada target) yang terjadi pada tahun 2013.

RUMUSAN MASALAH

1). Apakah penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? 2). Apakah penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? 3). Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

TUJUAN PENELITIAN

1). Untuk membuktikan secara empiris penerapan akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2). Untuk membuktikan secara empiris penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3). Untuk membuktikan secara empiris penerapan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip berikut (LAN BPKP, 2011):

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan

- 2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusdiklatwas BPKP-2007
- 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
- 6) Menyajikan keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntansi Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Halim (2012), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara/daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.”

Menurut Halim (2012) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian,

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.

Penerapan Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara umum, tujuan dan fungsi dari pelaporan keuangan adalah :

- 1) Kepatuhan dan pengelolaan
- 2) Akuntabilitas dan pelaporan
- 3) Perencanaan dan informasi
- 4) Kelangsungan organisasi
- 5) Hubungan masyarakat
- 6) Sumber fakta dan gambaran

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh instansi wajib Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Instansi wajib LAKIP yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ada terdapat 27 SKPD untuk dijadikan sampel. Sampel penelitian ini adalah kepala bagian perencanaan, kepala sub bagian keuangan, kepala bagian kepegawaian (dengan pengkategorian

pangkat/golongan dari eselon III dan eselon IV) yang bertugas di Instansi Pemerintah Daerah yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Kuncoro (2003) dalam Cefrida (2014). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan, Sugiono (2008).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu dengan mengisi kuisisioner. Data tersebut berasal dari jawaban responden atas kuisisioner yang dibagikan kepada responden dalam hal ini semua satuan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Agam. Sumber data penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari pengisian kuisisioner yang telah dikirim kepada satuan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Agam.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisisioner. Kuisisioner penelitian diadopsi dan dikembangkan atas kuisisioner yang telah digunakan penelitian – penelitian terdahulu.

Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi

linear berganda. Adapun bentuk matematis regresi berganda sebagai berikut:

Uji Hipotesis

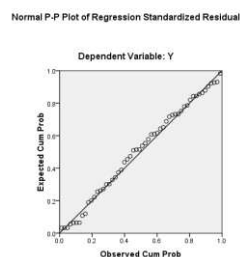
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik non-parametrik untuk menguji hipotesis H1, H2 dan H3 oleh karena itu setiap data konstruk variabel harus terlebih dahulu diuji normalitasnya. Untuk mendapatkan simulatan dari garis analisis regresi berganda, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan bantuan *software statistical product and service solution* (SPSS). Pengaruh langsung variabel independen akan diuji menggunakan p value $< 0,05$, dapat diuji dengan melihat nilai standardized koefisien regresi.

HASIL PENELITIAN

Hasil Pengujian Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi yang normal. Pada penelitian ini, pengujian normalitasnya dapat dilihat dari normal probably plot dan hasilnya dapat dilihat dari grafik/gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 1.
Pengujian Normalitas Data



Hasil Pengujian Asumsi Klasik

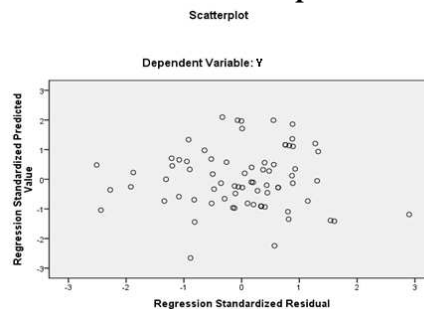
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda akan disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2005).

Gambar 2.
Grafik Scatterplot



Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Analisis data dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , serta melihat nilai signifikansinya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan Pvalue $< \alpha$, maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika,

$t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $P_{value} > \alpha$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berikut ini hasil pengujian hipotesis:

Tabel 2.
Hasil Pengujian Hipotesis 1

t-hitung	t-tabel	Sig	α	Kesimpulan Penelitian
2,319	2,006	0,024	0,05	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan 2015

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t_{hitung} variabel penerapan akuntansi keuangan daerah adalah 2,319 dan t_{tabel} adalah 2,006 sehingga diperoleh kesimpulan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $P_{value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Sehingga hipotesis pertama (H_1) dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_1 diterima.

Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Analisis data dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , serta melihat nilai signifikansinya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan $P_{value} < \alpha$, maka, H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika, $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $P_{value} > \alpha$ maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Berikut ini hasil pengujian hipotesis:

Tabel 3.
Hasil Pengujian Hipotesis 2

t-hitung	t-tabel	Sig	α	Kesimpulan Penelitian
4,560	2,006	0,000	0,05	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan 2015

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t_{hitung} variabel penerapan akuntansi keuangan adalah 4,560 dan t_{tabel} adalah 2,006 sehingga diperoleh kesimpulan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $P_{value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti penerapan akuntansi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Sehingga hipotesis kedua (H_2) dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_2 diterima.

Pengaruh Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Analisis data dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , serta melihat nilai signifikansinya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan $P_{value} < \alpha$, maka, H_0 ditolak dan H_3 diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika, $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $P_{value} > \alpha$ maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Berikut ini hasil pengujian hipotesis:

Tabel 4.
Hasil Pengujian Hipotesis 3

t-hitung	t-tabel	Sig	α	Kesimpulan Penelitian
5,393	2,006	0,000	0,05	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan 2015

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t_{hitung} variabel sistem informasi adalah 5,393 dan t_{tabel} adalah 2,006 sehingga diperoleh kesimpulan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $P_{value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti sistem informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas

kinerja instansi. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_3 diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian adalah:

1. Hasil analisa data dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi di Kabupaten Agam. Artinya pada SKPD Kabupaten Agam, akuntabilitas kinerja masing-masing SKPD dipengaruhi oleh penerapan akuntansi keuangan daerah.
2. Hasil analisa data dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi di Kabupaten Agam. Artinya semakin baik penerapan akuntabilitas keuangan maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja instansi di Kabupaten Agam.
3. Hasil analisa data dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi di Kabupaten Agam. Artinya pada SKPD Kabupaten Agam, akuntabilitas kinerja masing-masing SKPD dipengaruhi oleh sistem informasi.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, namun

demikian diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam praktek dan pengembangan berikutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain: adalah: penelitian ini masih hanya masih terbatas dilakukan di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Agam sehingga kurang mampu mengeneralisasi keefektifan pengimplementasian penerapan akuntansi keuangan daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

Saran

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka disarankan untuk penelitian yang akan datang memperhatikan hal-hal berikut:

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan beberapa pendekatan lain untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan *right issue*.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan indikator pengukuran yang lain seperti *profit margin on sales*, *quick ratio*, *fixed asset turn over* dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hilmi. 2005. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta). KOMPAK.No.13, Januari-April 2005. Hal: 37-67.

- Afiah, Nunuy Nur. 2010. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anjarwati, Mei. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada SKPD se-Kabupaten, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang). *Under Graduates thesis*, Universitas Negeri Semarang.
- Aribowo, Fajar. 2007. Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas. *Harian Bisnis Indonesia*. 19 November 2007. Jakarta.
- Astuti, Ratih Widya. 2011. Persepsi terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran, Akuntabilitas, dan Penggunaan Informasi Kinerja di Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Semarang. *Jurnal*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2011. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Diklat Pembentukan Auditor Anggota TIM. Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 2009. Sistem Akuntansi: Penyusunan, Prosedur dan Metode. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Cefrida.S, Mentari. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. 2014. Program Sarjana Universitas Riau.
- Eko Setiawan, Dr. Andreas, MM,Ak dan Drs. Rusli,MM,Ak. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Gistyan, Rico. 2014. Akuntabilitas Keuangan, Kompetensi Pegawai dan Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Universitas Riau. Pekanbaru.